

## ANGGOTA KOMISI III DPR RI, SALURKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) SENILAI TOTAL RP 1,48 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.id/wp-content/uploads/2023/10/BSPS-2048x1041.webp>

### Isi Berita:

KAJEN, Radarpekalongan.id – Anggota Komisi III DPR RI Dapil Jateng X, Dede Indra Permana, Senin (09/10/2023) menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai total Rp 1,48 Miliar. Penyaluran dilakukan di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Pekalongan dengan jumlah sebanyak 74 unit rumah.

Penyaluran Program BSPS dari Kementerian PUPR dilaksanakan secara simbolis oleh anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dede Indra Permana Soediro diwakili oleh Staf Ahli, Beny Trias Santiko secara langsung kepada penerima. Adapun penerima berasal dari berbagai desa dari 19 Kecamatan di Kabupaten Pekalongan.

Masing masing warga mendapat bantuan program BSPS senilai Rp 20 juta. Total penerima sebanyak 74 orang sehingga total yang disalurkan senilai Rp 1,48 Miliar.

Staf Ahli Anggota Komisi III DPR RI Jateng X, Beny menyampaikan kegiatan kali ini merupakan serah terima secara simbolis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan merupakan aspirasi anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah 10, Dede Indra Permana Soediro.

” Kami menyerahkan secara simbolis kepada penerima bantuan sebanyak 74 penerima yang mana bantuan ini merupakan usulan tahun 2023. Program BSPS akan langsung dilaksanakan dan harapannya selesai juga bulan Oktober 2023 ini, “terangnya.

Dijelaskan, untuk satu penerima nanti akan mendapatkan dana sebesar Rp 20 juta, meliputi material senilai Rp 17,5 dan untuk tenaga Rp 2,5 juta. Sedangkan penerima program harus ada kriteria tertentu, penerima sesuai kriteria yang sudah ditetapkan Kementerian PUPR <https://pu.go.id/>.

“Penerima yang sudah terpilih adalah penerima yang betul-betul memenuhi syarat yang sudah disarankan oleh PUPR. Harus sesuai jenis yang sudah di berikan salah satunya

perumahan yang strukturnya masih kurang bagus dan tidak layak huni jadi. Untuk itu kami harapkan bantuan berupa stimulan ini, kepada para calon penerima agar rumahnya jadi layak huni dan lebih baik dari kondisi yang sebelumnya.”

“Kemudian penerima terutama adalah struktur karena penilaian dari BSPS ini lebih fokus biar lebih kuat biar kokoh, sehingga rumah akan sangat layak, ” imbuhnya.

Seorang penerima, Tarjamah alamat Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni mengaku senang dengan adanya bantuan program BSPS.

“Saya menyampaikan banyak terimakasih, karena saat ini rumah saya masih menggunakan papan,” imbuhnya. (Yon)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarpekalongan.id/anggota-dpr-ri-dede-salurkan-bsps/2/>, “Anggota Komisi III DPR RI, Dede Salurkan Program BSPS Senilai Total Rp 1,48 Miliar”, tanggal 9 Oktober 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/10/09/suka-cita-nenek-tarjamah-pekalongan-dikasih-rp-20-juta-program-bsps-rumahnya-tak-akan-lagi-papan>, “Suka Cita Nenek Tarjamah Pekalongan, Dikasih Rp 20 Juta Program BSPS, Rumahnya Tak Akan Lagi Papan”, tanggal 9 Oktober 2023.

### **Catatan :**

- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. <sup>1</sup>
- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, bentuk BSPS dapat diberikan dalam bentuk. Uang atau barang.
- Lebihlanjut disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadayabahwa:
  - a. ayat (1): BSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada perseorangan penerima BSPS guna membeli bahan bangunan dalam rangka kegiatan PB atau PK.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

- b. ayat (2): Dalam hal penerima BSPS tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan PB atau PK, maka BSPS dalam bentuk uang dapat digunakan untuk upah kerja.
  - c. ayat (3) Penerima BSPS yang tidak memiliki kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
    - 1) lanjut usia sekurang-kurangnya 58 (lima puluh delapan) tahun; dan/atau
    - 2) penyandang disabilitas.
  - d. ayat 4: Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan paling banyak 15% (lima belas persen) dari besaran BSPS yang diterima.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 6:
    - a. ayat (1): BSPS dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat berupa bahan bangunan untuk rumah, Rumah, atau bahan bangunan untuk PSU.
    - b. ayat (2): Bahan bangunan untuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada perseorangan penerima BSPS di lokasi yang tidak terlayani toko/penyedia bahan bangunan.
    - c. ayat (3): Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada perseorangan penerima BSPS dalam rangka melaksanakan program Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri.
    - d. ayat (4): Bahan bangunan untuk PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada kelompok penerima BSPS dalam rangka mewujudkan perumahan yang layak huni.
    - e. ayat (5): Pengadaan BSPS dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Dengan dana BSPS yang diberikan masyarakat diharapkan berswadaya membangun rumahnya menjadi lebih layak huni. Pada tahun 2022, program tersebut disalurkan sebanyak sebanyak 29.674 unit rumah di Provinsi Jateng yang tersebar di 32 kabupaten/kota melalui program BPS reguler yang bersumber dari APBN Rupiah Murni (RPM) dan World Bank melalui program National Affordable Housing Program (NAHP). Adapun lokasi dan sebarannya meliputi; Kabupaten Brebes 2.189 unit, Kabupaten Cilacap 1.515 unit, Kota Tegal 45 unit, Kabupaten Tegal 1.339 unit, Kabupaten Banyumas 485 unit, Kabupaten Pemalang 2.031 unit, Kabupaten Purbalingga 100 unit, Kabupaten Pekalongan 752 unit, Kabupaten Banjarnegara 1.269 unit, Kabupaten Kebumen 478 unit, Kabupaten Batang 1.461 unit, dan Kabupaten Wonosobo 90 unit.<sup>2</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> Dikutip dari <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-telah-menyalurkan-29674-unit-rumah-swadaya-di-provinsi-jawa-tengah-tahun-2022>, diakses pada tanggal 9 November 2023.